



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

LAPORAN KINERJA KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024



www.kab-timortengahutara.kpu.go.id



[kputimortengahutara](https://www.instagram.com/kputimortengahutara)



[KPU Timor Tengah Utara](https://www.facebook.com/KPU.Timor.Tengah.Utara)



[KPU Timor Tengah Utara](https://twitter.com/KPU.Timor.Tengah.Utara)



[KPU TTU](https://www.youtube.com/KPU.TTU)

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Laporan Kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024, telah disusun sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 08/PR.01.3-Kpt/5303/KPI-Kab/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.

KPU Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara lebih baik lagi di masa mendatang dalam mendukung visi KPU untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Kefamenanu,



Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara

Petrus Uskono

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan capaian strategis KPU Kabupaten Timor Tengah Utara pada Tahun Anggaran 2024 melainkan juga rekomendasi ke depan menuju Pemilu/Pemilihan yang lebih berkualitas.

KPU telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan indikator-indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome, setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara umum pengukuran capaian kinerja tahun 2024 KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada table dibawah ini :

Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4		
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%	100%	25%
2.	Terwujudnya Sumber	Indeks Reformasi	78	70.11	89.88

	Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Birokrasi			%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	77,5%	68.21 %	88.01 %
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	77%	71.47 %	92.81 %
		Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam pemilu/pemilihan	77%	55.49 %	72.04 %
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
5.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman	Persentase KPU Kabupaten yang	100%	100%	100%

	dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai			
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan	90%	100%	111.11%

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan pagu anggaran dari APBN sebesar Rp. 27.023.180.000 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) dan Hibah sebesar 20.459.543.000 (*Dua Puluh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.294.778.265 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) atau sebesar 99.60% (*Sembilan Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Persen*).

Bila dibandingkan dengan tahun 2023 di mana KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menerima pagu anggaran sebesar Rp. 34.300.358.000 (*Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*). Anggaran tersebut dialokasikan pada 2 (dua) program KPU sebagaimana tercantum dalam renstra, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 2.276.337.000;
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 32.024.021.000;

No	Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Capaian
1.	2022	4.414.296.000	4.394.409.521	99.65%
2.	2023	32.024.021.000	33.706.480.287	98.27%
3.	2024	47.482.723.000	47.294.778.265	99.60%

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menyelenggarakan beberapa tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak tahun 2024, antara lain, Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhoc, Pemutakhiran Data Pemilih, Kampanye, Pencalonan, Pengelolaan dan Pengadaan Logistik, Pemungutan dan Penhitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, selain itu pada tahun 2024 KPU Kabupaten Timor Tengah Utara juga melaksanakan kegiatan rutin untuk mendukung tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 seperti, Pengelolaan Program dan Anggaran Pemilu/Pemilihan, mengikuti pelatihan teknis kepemiluan, sosialisasi tahapan Pilkada tahun 2024 serta sosialisasi kebijakan/regulasi KPU kepada stakeholder.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis 2020 – 2024	7
B. Perjanjian Kinerja	21
C. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Pengukuran Kinerja	25
B. Analisis Capaian Kinerja	27
C. Kinerja Anggaran	57
BAB IV PENUTUP	58
A. KESIMPULAN	58
B. SARAN	58
C. TINDAK LANJUT	58
Lampiran – Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

KPU adalah lembaga Negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia, menurut amandemen UUD 1945. Pada tahun 2024, KPU menetapkan jadwal tahapan untuk penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Jadwal ini berlaku untuk tahapan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Nasional berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena itu, pemilihan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mudah diakses untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati. Rencana tindakan yang jelas dan implementasi yang tegas diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan. Oleh karena itu, kesuksesan Pemilu Serentak 2024 dapat dipengaruhi secara signifikan oleh langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan prosesnya. Dengan demikian, tahapan pemilihan harus dilaksanakan secara menyeluruh diseluruh tingkatan KPU di Indonesia.

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Mengimplementasikan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengacu pada PKPU tersebut Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban, sebagai berikut :

1. Tugas

KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota;
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan

- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang
- KPU Kabupaten/Kota b e r w e n a n g :
- a. Menetapkan jadwal Pemilu di Kabupaten/Kota;
 - b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - d. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - e. Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

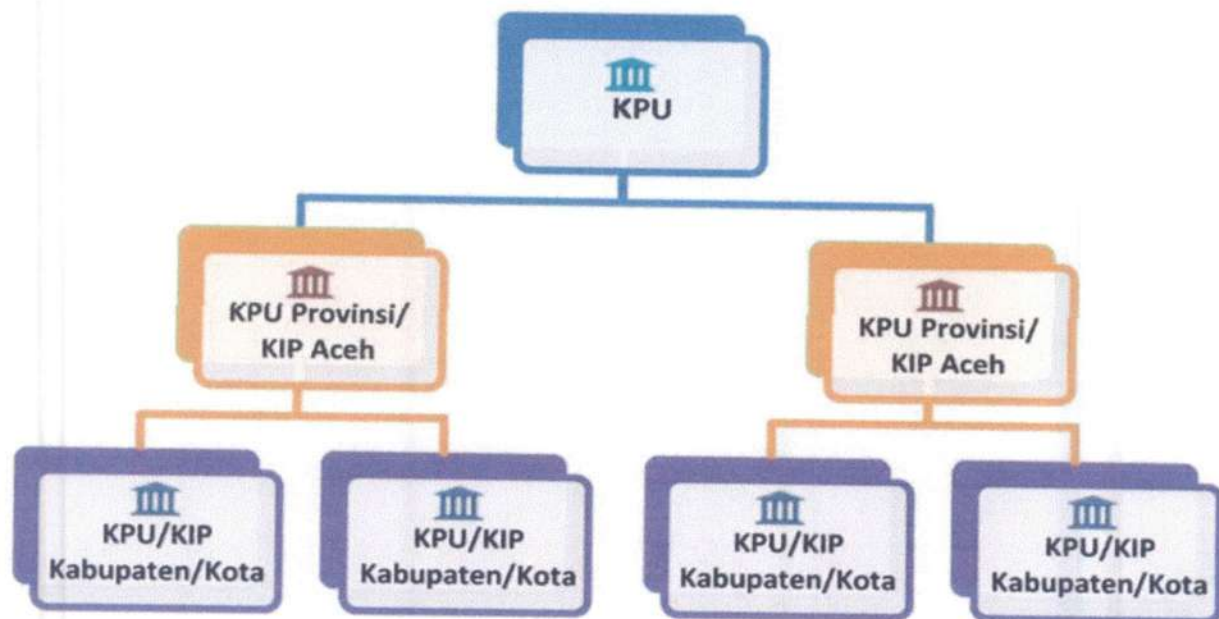
KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;

- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkis. Hirarkis artinya lembaga yang berada di bawahnya bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada KPU Provinsi dan KPU Provinsi bertanggungjawab kepada KPU. Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya sekali untuk masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi telah diubah dari 5 (lima) menjadi 7 (tujuh) dan 5 (lima) berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi geografis. Selanjutnya jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Namun melalui Amar Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota

ditetapkan 5 (lima) orang. Di setiap tingkatan satuan kerja, anggota KPU bertindak sebagai pimpinan KPU. Mereka berperan penting dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU untuk menjalankan peran dan fungsinya serta mencapai visi dan misi organisasi.

Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah. Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas Divisi Anggota KPU Kabupaten berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
- b. Divisi Teknis Penyelenggaraan
- c. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
- d. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan

Hubungan kerja organisasi diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, yang merupakan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yakni:

- a. Hubungan kerja Ketua dan Anggota KPU Kabupaten

Hubungan kerja Ketua dan Anggota KPU Kabupaten meliputi koordinasi hubungan kerja antar Divisi dan pelaksanaan tugas-tugas divisi dan korwil dengan kesekretariatan. Ketua dan Wakil Ketua Divisi bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang divisi.

- b. Hubungan kerja Anggota KPU Kabupaten dengan Kesekretariatan
Divisi anggota KPU Kabupaten mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kabupaten.

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU Kabupaten, dipandang perlu untuk membentuk Sekretariat KPU Kabupaten untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. Sekretariat KPU Kabupaten berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU Kabupaten.

Gambar 1.2
Struktur organisasi dan Tata Kerja KPU
Kabupaten Timor Tengah Utara



Untuk meningkatkan tugas, fungsi dan kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, bahwa menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk unit kerja pengadaan barang/jasa yang memiliki

tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah,. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Selain itu, sumber daya manusia adalah aset organisasi yang paling penting untuk mencapai visi dan misi organisasi. Pada tahun 2024 jumlah SDM KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 5.389 orang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 5 Orang;
2. PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 12 orang;
3. PPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja) sebanyak 1 orang
4. PPNPN (Tenaga Pendukung) sebanyak 11 orang
5. Tenaga PPkom sebanyak 1 orang
6. Tenaga Pengamanan Logistik sebanyak 4 orang
7. Badan Adhoc sebanyak:
 - a. PPK sebanyak 120 orang dan Sekretariat PPk sebanyak 72 orang;
 - b. PPS sebanyak 579 orang dan Sekretariat PPS sebanyak 579 orang;
 - c. KPPS sebanyak 3.115 orang dan Petugas Ketertiban TPS sebanyak 890 orang;

C. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024 menyajikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan sesuai dengan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPU Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja dan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara yang demokratis, tepat waktu, efisiensi dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 5 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara pada akhir periode perencanaan (tahun 2024). Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 disajikan pada table di bawah ini:

Tabel 2.1

Matriks Perencanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara Periode 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
			0	1	2	3	
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas						
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%

Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Satuan Kerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang berkualitas	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	76	77	78	79	80
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
2 Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.						
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Timor Tengah Utara	Persentase Partisipasi Pemilih Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan di Kabupaten Timor Tengah	75%	75%	75%	75%	75%

		Utara dalam Pemilu/Pemilihan					
		Persentase partisipasi pemilih	75%	75%	75%	75%	75%
		Disabilitas di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum , Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil						

Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase terlaksananya Pemilu/ Pemilihan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang Aman dan Damai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	95 %	95%	95%	95%	95%

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%

2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	77,5%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	77%
		Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam pemilu/pemilihan	77%
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
5.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan	90%

C. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Program - Kegiatan		Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen		2.526.929.000
•	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.436.661.000
•	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	90.268.000
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		44.955.794.000
•	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	20.459.543.000
•	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.235.857.000
•	Pembentukan Badan Adhock	19.904.310.000
•	Masa Kampanye Pemilu	99.666.000
•	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1.617.030.000
•	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.639.380.000
•	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	2000
•	Penetapan Hasil Pemilu	6000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024. Seluruh Sasaran Strategis yang dituangkan dalam PK Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024. Hasil pengukuran atas capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas				
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%	100%	25%
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	78	70.11	89.88%
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat				

1.	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	77.5%	68.21%	88.01%
2.	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	77%	71.47%	92.81%
3.	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	77%	55.49%	72.04%

Sasaran Strategis 4:

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

1.	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
----	--	------	------	------

Sasaran Strategis 5:

Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

1.	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan pemilu/pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
2.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	100%	90%

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%	100%	25%

1.1 Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Pasal 14 dijelaskan bahwa Partai Politik dapat melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui sipol.

Salah satu yang menjadi output pada tahun ini adalah terfasilitasinya Partai Politik yang melakukan memutakhirkan

data Partai Politik melalui Sipol secara berkelanjutan Informasi Partai Politik. Sebanyak 18 (delapan belas) Partai Politik telah melakukan pemutakhiran data kepengurusan baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Adapun informasi mengenai Partai Politik yang memutakhirkan dan dipublikasikan pada public terdapat pada laman <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Parpol>

Untuk memenuhi target indikator Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publi,, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara telah melakukan upaya pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Integrasi SIPOL menuju data Partai Politik Berkelanjutan
2. KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan bimbingan teknis kepada partai politik tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara
3. KPU Kabupaten Timor Tengah Utara membuka helpsdek terhadap kendala dan penerapan Aplikasi SIPOL.

Beberapa upaya yang dilakukan di tahun 2024 untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian, diantaranya:

1. KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan kegiatan pengisian Aplikasi SIPOL Berkelanjutan;
2. Evaluasi pemanfaatan Aplikasi SIPOL;

Perbandingan realisasi capaian Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik tahun 2022-2023 dengan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Tabel 3.1 Capaian IK.1.1 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	
IK.1.1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	
Realisasi 2022-2023	2024	

2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)
25%	25%	25%	100%	25%

Secara factual teknologi informasi berperan penting dalam proses perubahan politik. Terdapat keyakinan bahwa teknologi informasi dapat membuka jalan bagi demokrasi langsung sementara itu serta menghilangkan hambatan komunikasi dalam proses demokratisasi. KPU menggunakan Sistem Informasi Partai Politik untuk membantu proses pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi factual partai politik.

Sasaran Strategis 2 :

Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU yang berkualitas

Capaian indikator-indikator sasaran “Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.1	Indeks Reformasi Birokrasi	78	70.11	89.88%
2.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100%
2.3	Nilai Keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%

2.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: a) kelembagaan atau organisasi; b) ketatalaksanaan atau

business process; dan c) sumber daya manusia aparatur, reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Model PMPRB disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Capaian Perbandingan target Indeks Reformasi Birokrasi, dan target tahun 2024 adalah :

Sasaran Strategis	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas			
IK.3.2	Indeks Reformasi Birokrasi			
Realisasi 2022-2023		2024		
2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)
66.25	70.11	78	70.11	89.88%

2.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja

SAKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP adalah instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategic, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Kementerian PAN dan RB.

Perbandingan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2022-2023 dengan target di tahun terakhir Renstra 2020-2024 adalah:

Tabel 2.1 Capaian IK.1.3 Tahun 2024

Sasaran Strategis		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU yang berkualitas		
IK.1.3		Nilai Akuntabilitas Kinerja		
Realisasi 2022-2023		2024		
2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)
B	BB	B	BB	100%

Nilai Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2023 adalah 70,2 dengan kategori “BB”. Dengan target sebesar BB maka capaian untuk indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 adalah B. Sehingga target pada indikator ini dapat dikategorikan tercapai periode tahun 2024.

2.3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dalam hal ini bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan hubungan kemasyarakatan, peliputan, pengolahan informasi dan pemberian layanan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu, 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, maka KPU Kabupaten Timor Tengah Utara berkewajiban memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada stakeholder eksternal dan masyarakat terkait penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024, sepanjang informasi tersebut tidak dikecualikan.

Keterbukaan informasi pada setiap tahapan pemilihan yang sudah dirintis KPU Kabupaten Timor Tengah Utara pada Pemilu 2014 dan mendapatkan banyak apresiasi, menjadi pengalaman berharga dan terus diupayakan. Aplikasi ppid.kpu.go.id yang memfasilitasi pelayanan informasi dari seluruh Indonesia, bahkan beberapa permohonan informasi dari mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan diluar wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara telah ditindaklanjuti secara cepat.

Sebagai upaya dalam memperbaiki mekanisme pelayanan permintaan informasi public, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Melakukan upaya penguatan dan penyebaran informasi public sebagaimana amanat Undang-undang keterbukaan informasi public;
2. Terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan melakukan berbagai langkah strategis lainnya serta akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.

Sasaran Strategis 3 :

Terwujudnya kesadaran pemilih kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

Capaian indikator-indikator sasaran “Terwujudnya kesadaran pemilih kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	68.21%	88.01%
3.2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	77%	71.47%	92.81%
3.3	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	77%	55.49%	72.04%

3.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan adalah tanggung jawab bersama antara penyelenggara Pemilu, Pemerintah, partai politik dan segenap warga Negara dimana perhelatan itu diselenggarakan. Partisipasi tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak, semua harus bersatu padu melakukan strategi sesuai kapasitas masing-masing. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Keaktifan masyarakat berpartisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa.

Pada Pemilu Legislatif tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih mencapai 72.51%, sedangkan pada tahun 2024 tingkat partisipasi pemilih mencapai 75% sehingga tingkat partisipasi Pemilu Legislatif menunjukkan peningkatan pada tahun 2024.

Perbandingan realisasi partisipasi pemilih dalam pemilu/Pemilihan tahun 2020 2024 adalah :

Tabel 3.1 Capaian IK. 3.1 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Terwujudnya kesadaran pemilih kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat			
IK. 3.1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan			
Realisasi 2022-2023		2024		
2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	77.5%	68.21%	88.01%

Indikator kinerja ini merupakan salah satu IKU yang pencapaiannya baru dapat diukur pada saat dan setelah pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu/Pemilihan berdasarkan jumlah Pemilih Khusus yang terdaftar di hari pemungutan suara. Oleh karena itu target pada indikator ini

pencapaian kinerjanya pada tahun 2024 hanya mencapai 88.01%.

Meskipun pada tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara telah melakukan upaya-upaya untuk peningkatan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024, antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan publikasi pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan pada website KPU Kabupaten Timor Tengah Utara <https://kab-timortengahutara.kpu.go.id/>, platform media social KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Sebagai simbol bahwa Pemilu tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi justru pemilu dimulai dan dilaksanakan di daerah. Sehingga satu tahun menuju hari pemungutan suara pemilu 2024 ditandai dengan peluncuran kirab dari 7 titik diseluruh Indonesia. nanti secara estafet dari kabupaten/kota tempat dimulainya kirab itu secara bergiliran berstafet, sambung-menyambung dan nanti akan berakhir pada bulan November akan sampai di ibukota, sampai di kantor KPU Pusat. Peluncuran Kirab Pemilu tiba di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 2 Maret sampai 6 Maret 2023.
3. Program KPU *Goes to Campus* menjadi salah satu kegiatan pendidikan pemilih sekaligus sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, bertujuan untuk peningkatan kesadaran khususnya bagi kalangan mahasiswa terhadap pemilu, penyelenggara pemilu dan partai politik secara umum. Diharapkan mahasiswa turut berpartisipasi menyukseskan dan berperan aktif dalam setiap tahapan dan diharapkan agar mahasiswa sebagai *agent of change* tidak golput, dapat memilih dengan cerdas dan menolak apapun bentuk dari politik uang dan bukan hanya menyalurkan hak suaranya namun bagi mahasiswa yang sudah cukup umur

bisa berpartisipasi dalam ppemilu mendaftar sebagai petugas KPPS.

3.2 Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu/pemilihan tahun 2024 berjumlah 192.812 jiwa. Terdiri dari laki-laki sebanyak 94.608 jiwa dan perempuan sebanyak 98.204 jiwa di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok perempuan menjadi salah satu target potensial yang diincar partai politik untuk mendulang suara. Perempuan melalui berbagai komunitas bisa menjadi pintu bagi peserta pemilu untuk memudahkan dalam menjalankan program-programnya. Perempuan juga menjadi target potensial mengingat besarnya jumlah pemilihnya. Meski tidak terpaut jauh, jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pemilih laki-laki.

Pelibatan perempuan dalam politik sejalan dengan amanat UUD 1945 bahwa setiap warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama, memiliki kesetaraan untuk ikut serta dalam pemerintahan. Dan pemilu inklusif merupakan peluang, untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan meningkatkan partisipasi dan mengubah persepsi public atas kemampuan perempuan. “Dimana hasilnya perempuan dapat memiliki suara politik yang lebih kuat dan semakin diakui sebagai warga Negara setara”.

Meski diakui ada beragam hambatan yang menyertai pelibatan perempuan mulai dari sumber daya manusia, factor social kultural, dukungan partai politik hingga preferensi politik. KPU Kabupaten Timor Tengah Utara berupaya dengan menerapkan strategi peningkatan representasi perempuan dengan meningkatkan kualitas perempuan melalui pelatihan dan

pendidikan, pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan serta mempertegas keberadaan kelompok perempuan. Pra wacana dalam dunia politik perempuan masih kurang diberitakan, peran politik perempuan seolah-olah telah diwakilkan kepada laki-laki yang menjadi public figure dan secara kultur masih menguatnya budaya patriarki di masyarakat serta adanya pemahaman agama yang menomorduakan eksistensi perempuan dalam politik.

Pada Pemilu Legislatif tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih perempuan mencapai 78.86%, sedangkan pada tahun 2024 tingkat partisipasi pemilih mencapai 78% sehingga tingkat partisipasi Pemilu Legislatif menunjukkan penurunan pada tahun 2024.

Perbandingan realisasi Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan tahun 2020-2024 adalah:

Sasaran Strategis	Terwujudnya kesadaran pemilih keadilan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat			
IK. 3.2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan			
Realisasi 2022-2023		2024		
2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	77%	71.47%	92.81%

Indikator Kinerja ini merupakan salah satu IKU yang pencapaiannya baru dapat diukur pada saat dan setelah pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu/Pemilihan berdasarkan jumlah Pemilih Khusus yang terdaftar di hari

pemungutan suara. Oleh karena itu target pada indikator ini pada tahun 2024 hanya mencapai 92.81%.

Meskipun pada tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara telah melakukan upaya-upaya untuk peningkatan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan 2024, antara lain sebagai berikut:

1. Partisipasi atau keikutsertaan pemilih perempuan dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupatenn Timor Tengah Utara antara lain dalam bentuk diskusi, dialog interaktif, sekolah demokrasi yang dilaksanakan atas inisiasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Materi yang disampaikan terkait dengan informasi kepemiluan, seperti:
 - a. Tahapan Pemilu/Pemilihan 2024
 - b. Pemilih dan pendaftaran dalam DPT
 - c. Hari Pemungutan Suara
 - d. Peserta Pemilu
 - e. Jumlah kursi dan daerah pemilihan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara
 - f. Partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
 - g. Menangkal berita bohong/hoaks
 - h. Ajakan untuk memilih
 - i. Informasi kepemiluan lainnya.

3.3. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan

Pemilu/Pemilihan tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat, sukses tidaknya proses pemilu/pemilihan bahkan sering diukur berdasarkan tinggi rendahnya partisipasi publik dalam mengikuti setiap tahapan kepemiluan. Anggapan ini sesungguhnya tidak salah mengingat keterlibatan public, menghasilkan para pemimpin duduk di legislatif dan eksekutif. Semakin tinggi partisipasi maka semakin kuat dukungan yang

dimiliki. Dan berbicara mengenai keterlibatan public, ada berbagai macam kelompok di masyarakat yang punya hak dan ikut terlibat di dalamnya. Salah satunya pemilih yang berasal dari kelompok disabilitas.

Disabilitas sendiri berasal dari kata serapan bahasa Inggris, *disability* atau *disabilities* (*different abilities people*) atau dapat juga diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan khusus. Kesepakatan penggunaan istilah “penyandang disabilitas” ini lahir sejak 2010, tepatnya dalam kegiatan seminar nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di Bandung pada tanggal 29 Maret – 1 April 2010. Istilah ini lebih filosofis, konstruktif dan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), serta lebih sesuai dengan istilah yang digunakan secara internasional.

Hak politik penyandang disabilitas telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 pasal 13 yang mengatur tentang hak politik untuk penyandang disabilitas, dimana salah satunya adalah memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk dapat ikut berpartisipasi politik dalam pemilu/pemilihan. Partisipasi politik penyandang disabilitas tidak boleh hanya terbatas pada saat pemberian suara saja, tetapi para penyandang disabilitas juga dapat berperan serta aktif dalam kegiatan politik lainnya.

Pada saat pemilu/pemilihan, penyandang disabilitas juga mendapatkan hak yang sama dan telah diatur dalam pasal 350 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu bentuk dukungan kepada pemilih disabilitas adalah pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang lokasinya mudah dijangkau, tidak menggabungkan desa, dan memerhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia. Pasal 35 ayat 1 juga menjelaskan bahwa pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan

suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihannya.

Perbandingan realisasi Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan tahun 2020-2024 adalah:

Sasaran Strategis	Terwujudnya kesadaran pemilih kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat			
IK. 3.3	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan			
Realisasi 2022-2023		2024		
2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	77%	55.49%	72.06%

Indikator kinerja ini merupakan salah satu IKU yang pencapaiannya baru dapat diukur pada saat dan setelah pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu/Pemilihan berdasarkan jumlah Pemilih Khusus yang terdaftar dihari pemungutan suara. Oleh karena itu target pada indikator ini dapat dikategorikan belum tercapai pada periode tahun 2024.

Meskipun ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu 2024, adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih terhadap para penyandang disabilitas secara berkelanjutan, hal ini perlu dilakukan untuk dapat memberikan informasi-informasi kepemiluan dan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu khususnya bagi komunitas penyandang disabilitas. Serta tersedianya sarana dan prasarana aksesibel dalam pemilu bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat masalah

mobilitas gerak bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya dan dipastikan dalam penentuan TPS dengan memperhatikan akses dan kemudahan bagi penyandang disabilitas.

Sasaran Strategis 4:

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Indikator ini dapat diukur melalui jadwal dan tahapan Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024
(sumber Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024)

No	Tahapan	Waktu	Output
1.	Perencanaan Program dan Anggaran	2 Januari 2024	Sesuai Jadwal
2.	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	18 November 2024	Sesuai Jadwal
3.	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	17 April-5 November 2024	Sesuai Jadwal
4.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	31 Mei -23 September 2024	Sesuai Jadwal
5.	Pendaftaran Pasangan Calon	27-29 Agustus 2024	Sesuai Jadwal
6.	Penetapan Pasangan Calon	22 September 2024	Sesuai Jadwal
7.	Masa Kampanye	25 September-23 November 2024	Sesuai Jadwal

Tabel 4.1 Capaian IK 4.1 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi			
IK. 4.1	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku			
Realisasi 2022-2023		2024		
2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)
100%	100%	100%	100%	100%

Upaya yang telah dilakukan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dalam rangka menyelenggarakan tahapan Pemilu dengan aman dan damai pada seluruh tingkatan, sampai dengan Tahun 2024, yaitu memastikan seluruh PPK, PPS, dan KPPS untuk melaksanakan seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sehingga dapat terciptanya penyelenggaraan tahapan pemilu/pemilihan 2024 dapat berjalan dengan aman dan damai di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Sasaran Strategis 5 :

Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai serta penyelesaian sengketa hukum yang baik

Capaian indikator-indikator sasaran “Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai serta penyelesaian sengketa hukum yang baik” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
5.1	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
5.2	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	100%	111.11%

C. Kinerja Anggaran

Pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2024 adalah 99.60% Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang tahun 2024. Adapun Laporan Akuntabilitas KPU Kabupaten Timor Tengah Utara ini dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1.	Rupiah Murni	27.023.181.000	26.841.814.986	99.73%
2.	Hibah	20.459.542.000	20.452.963.279	99.97%
	Total	47.482.723.000	47.294.778.265	99.60%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN Tahun 2024 atau pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024. Laporan ini merupakan periode pelaporan kelima dalam merefleksikan implementasi Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2024. Adapun capaian realisasi kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 dapat disimpulkan dan tindaklanjuti untuk memperbaiki kinerja kedepan secara keseluruhan capaian kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 akan menjadi bahan input bagi penilaian RB dan penilaian AKIP Tahun 2024.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat kami ajukan baik ditujukan kepada instansi pusat maupun kepada internal organisasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara adalah :

1. Perlu meningkatkan kerja sama dengan instansi/stakeholder terkait dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Perlu dilakukan pemenuhan SDM sesuai dengan regulasi yang ada.
4. Peningkatan kualitas SDM secara bertahap perlu diitngkatkan terkait pelaksanaan tugas diantaranya : Pelatihan tentang Pemilu, Pelatihan tentang Pengelolaan Keuangan, Pelatihan tentang Produk Hukum dan penyelesaian sengketa hukum, Bimtek tentang Penyusunan

Renja dan LAKIP agar SDM yang ada memiliki cara pandang yang sama disamping pelatihan/kegiatan bimtek lainnya.

C. Rencana Tindak Lanjut

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara antara lain :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu/Pemilihan melalui media dan pendidikan pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Peserta Pemilu serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan;

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Dengan demikian, Laporan Kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 dapat tersusun sesuai rencana yang diharapkan dan memenuhi akuntabilitas, sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan pada Laporan Kinerja di masa mendatang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PETRUS USKONO

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTU

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kefamenanu, 5 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA ,

PETRUS USKONO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	77,5%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	77%
		Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam pemilu/pemilihan	77%
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
5.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	: Rp. 27.062.169.000
2. Program Dukungan Manajemen	: Rp. 2.363.759.000
Jumlah	: Rp. 29.425.928.000

Kefamenanu, 5 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,


 PETRUS USKONO

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 1 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	47,482,723,000	0	34,351,667,828	12,943,110,437	47,294,778,265	99.60 %	187,944,735
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	44,955,794,000	0	32,062,965,865	12,773,539,149	44,836,505,014	99.73 %	119,288,986
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	20,459,543,000	0	8,488,797,510	11,964,165,769	20,452,963,279	99.97 %	6,579,721
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	20,459,543,000	0	8,488,797,510	11,964,165,769	20,452,963,279	99.97 %	6,579,721
BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	20,459,543,000	0	8,488,797,510	11,964,165,769	20,452,963,279	99.97 %	6,579,721
051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	20,459,543,000	0	8,488,797,510	11,964,165,769	20,452,963,279	99.97 %	6,579,721
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000357. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
051.0B Dukungan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	20,459,542,000	0	8,488,797,510	11,964,165,769	20,452,963,279	99.97 %	6,578,721
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
000401. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
521211 Belanja Bahan	143,540,000	0	0	143,539,180	143,539,180	100.00	820
000372. Belanja Bahan ATK/Makan Minum/Spanduk/Penggandaan/Pencetakan Dll	143,540,000	0	0	143,539,180	143,539,180	100.00	820
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	7,912,683,000	0	4,321,802,500	3,586,182,500	7,907,985,000	99.94 %	4,698,000
000361. Belanja Honor Output Kegiatan	7,912,683,000	0	4,321,802,500	3,586,182,500	7,907,985,000	99.94 %	4,698,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9,872,833,000	0	2,534,477,477	7,338,077,160	9,872,554,637	100.00	278,363
000358. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9,872,833,000	0	2,534,477,477	7,338,077,160	9,872,554,637	100.00	278,363
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	258,077,000	0	0	256,576,763	256,576,763	99.42 %	1,500,237
000373. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	258,077,000	0	0	256,576,763	256,576,763	99.42 %	1,500,237
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13,888,000	0	12,885,000	1,003,000	13,888,000	100.00	0
000374. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13,888,000	0	12,885,000	1,003,000	13,888,000	100.00	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	172,320,000	0	151,871,340	20,448,050	172,319,390	100.00	610
000363. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	172,320,000	0	151,871,340	20,448,050	172,319,390	100.00	610
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,493,186,000	0	1,239,726,193	253,459,116	1,493,185,309	100.00	691

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 2 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000359. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,493,186,000	0	1,239,726,193	253,459,116	1,493,185,309	100.00	691
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	505,930,000	0	213,050,000	292,880,000	505,930,000	100.00	0
000362. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	505,930,000	0	213,050,000	292,880,000	505,930,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86,985,000	0	14,985,000	72,000,000	86,985,000	100.00	0
000360. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86,985,000	0	14,985,000	72,000,000	86,985,000	100.00	0
CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,235,857,000	0	753,125,343	450,706,380	1,203,831,723	97.41 %	32,025,277
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1,233,873,000	0	753,125,343	450,706,380	1,203,831,723	97.57 %	30,041,277
QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1,014,652,000	0	558,795,843	434,173,380	992,969,223	97.86 %	21,682,777
051 Penyusunan Rencana dan Anggaran Pemilu	803,279,000	0	363,174,000	428,684,380	791,858,380	98.58 %	11,420,620
051.0A Penyusunan Program, Kegiatan, dan Anggaran KPU, Pengelolaan Revisi Anggaran, Kajian/Analisa, Prosedur dan Mekanisme Penganggaran	245,967,000	0	235,375,000	6,910,300	242,285,300	98.50 %	3,681,700
521211 Belanja Bahan	29,583,000	0	22,377,000	6,910,300	29,287,300	99.00 %	295,700
000230. Belanja ATK/Makan Minum/Penggandaan/Pencetakan	29,583,000	0	22,377,000	6,910,300	29,287,300	99.00 %	295,700
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000	100.00	0
000005. Pengarah	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	100.00	0
000006. Penanggung Jawab	4,350,000	0	4,350,000	0	4,350,000	100.00	0
000007. Ketua	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000008. Sekretaris	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000	100.00	0
000009. Anggota	17,100,000	0	17,100,000	0	17,100,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	137,894,000	0	134,608,000	0	134,608,000	97.62 %	3,286,000
000010. Perjalanan Dinas Biasa	126,424,000	0	123,138,000	0	123,138,000	97.40 %	3,286,000
000231. Perjalanan Dinas Biasa Pembentukan dan Bimtek KPPS	11,470,000	0	11,470,000	0	11,470,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45,390,000	0	45,390,000	0	45,390,000	100.00	0
000233. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45,390,000	0	45,390,000	0	45,390,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
000232. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 3 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0B Penyusunan Prosedur dan Kebijakan Penganggaran, Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran	29,934,000	0	19,733,000	5,163,880	24,896,880	83.17 %	5,037,120
521211 Belanja Bahan	10,101,000	0	0	5,163,880	5,163,880	51.12 %	4,937,120
000234. Belanja ATK/Makan Minum/Penggandaan/Pencetakan	10,101,000	0	0	5,163,880	5,163,880	51.12 %	4,937,120
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,733,000	0	19,733,000	0	19,733,000	100.00	0
000235. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,733,000	0	19,733,000	0	19,733,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
000236. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
051.0C Konsolidasi Nasional Program Kerja dan Anggaran, Penguatan Kelembagaan dan Organisasi	78,175,000	0	78,175,000	0	78,175,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78,175,000	0	78,175,000	0	78,175,000	100.00	0
000237. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78,175,000	0	78,175,000	0	78,175,000	100.00	0
051.TB Tambahan Anggaran	369,114,000	0	0	369,114,000	369,114,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	369,114,000	0	0	369,114,000	369,114,000	100.00	0
000403. Insentif Pemilu Tahun 2024	369,114,000	0	0	369,114,000	369,114,000	100.00	0
051.TP Tambahan Perencanaan	80,089,000	0	29,891,000	47,496,200	77,387,200	96.63 %	2,701,800
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	42,715,000	0	24,291,000	18,421,200	42,712,200	99.99 %	2,800
000384. Kuasa Pengguna Anggaran	10,699,000	0	6,075,000	4,621,200	10,696,200	99.97 %	2,800
000385. Pejabat Pembuat Komitmen	10,440,000	0	5,976,000	4,464,000	10,440,000	100.00	0
000386. Pejabat Penguji Taihan dan Penandatanganan SPM	4,872,000	0	2,736,000	2,136,000	4,872,000	100.00	0
000387. Bendahara Pengeluaran	2,824,000	0	1,584,000	1,240,000	2,824,000	100.00	0
000388. Staf Pengelola	10,480,000	0	5,880,000	4,600,000	10,480,000	100.00	0
000389. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	3,400,000	0	2,040,000	1,360,000	3,400,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	30,730,000	0	0	29,075,000	29,075,000	94.61 %	1,655,000
000382. Pakian Dinas, Pakian Sopir/Kebersihan/Pramubakti,Pakian Satpam	30,730,000	0	0	29,075,000	29,075,000	94.61 %	1,655,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	444,000	0	0	0	0	0.00 %	444,000
000375. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	444,000	0	0	0	0	0.00 %	444,000
522141 Belanja Sewa	6,200,000	0	5,600,000	0	5,600,000	90.32 %	600,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 4 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000383. Belanja Sewa	6,200,000	0	5,600,000	0	5,600,000	90.32 %	600,000
113 Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	211,373,000	0	195,621,843	5,489,000	201,110,843	95.15 %	10,262,157
113.0A Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	205,613,000	0	191,061,843	4,289,000	195,350,843	95.01 %	10,262,157
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	2,000,000	0	155,000	0	155,000	7.75 %	1,845,000
000317. Langganan Koran	2,000,000	0	155,000	0	155,000	7.75 %	1,845,000
522111 Belanja Langganan Listrik	12,500,000	0	5,820,000	3,011,000	8,831,000	70.65 %	3,669,000
000315. Belanja Langganan Listrik	12,500,000	0	5,820,000	3,011,000	8,831,000	70.65 %	3,669,000
522113 Belanja Langganan Air	2,500,000	0	1,845,000	320,000	2,165,000	86.60 %	335,000
000313. Langganana Air	2,500,000	0	1,845,000	320,000	2,165,000	86.60 %	335,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	29,800,000	0	25,490,950	0	25,490,950	85.54 %	4,309,050
000314. Belanja Jasa Internet	29,800,000	0	25,490,950	0	25,490,950	85.54 %	4,309,050
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	158,813,000	0	157,750,893	958,000	158,708,893	99.93 %	104,107
000316. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	158,813,000	0	157,750,893	958,000	158,708,893	99.93 %	104,107
113.0B Pengelolaan Barang Milik Negara	5,760,000	0	4,560,000	1,200,000	5,760,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	5,760,000	0	4,560,000	1,200,000	5,760,000	100.00	0
000318. Anggota UAKPB	5,760,000	0	4,560,000	1,200,000	5,760,000	100.00	0
QGE.003 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	60,831,000	0	60,410,000	0	60,410,000	99.31 %	421,000
051 Persiapan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	60,831,000	0	60,410,000	0	60,410,000	99.31 %	421,000
051.0A Diklat Teknis, Pengelolaan Pelatihan Teknis, Monitoring dan Supervisi, Evaluasi	60,831,000	0	60,410,000	0	60,410,000	99.31 %	421,000
521211 Belanja Bahan	421,000	0	0	0	0	0.00 %	421,000
000238. Belanja ATK/Makan Minum/Penggandaan/Pencetakan	421,000	0	0	0	0	0.00 %	421,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60,410,000	0	60,410,000	0	60,410,000	100.00	0
000239. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60,410,000	0	60,410,000	0	60,410,000	100.00	0
QGE.004 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	158,390,000	0	133,919,500	16,533,000	150,452,500	94.99 %	7,937,500
051 Penyusunan Tata Cara Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	158,390,000	0	133,919,500	16,533,000	150,452,500	94.99 %	7,937,500
051.0A Fasilitasi Kehumasan, Sosialisasi, Kerjasama Hubungan Lembaga, Fasilitasi Layanan Pers, PPID	158,390,000	0	133,919,500	16,533,000	150,452,500	94.99 %	7,937,500

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 5 dari 17

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211	Belanja Bahan	52,780,000	0	29,469,500	16,533,000	46,002,500	87.16 %	6,777,500
	000242. Belanja ATK/Makan Minum/Penggandaan/Pencetakan	52,780,000	0	29,469,500	16,533,000	46,002,500	87.16 %	6,777,500
522191	Belanja Jasa Lainnya	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
	000241. Sosialisasi Melalui Media Massa/Media Lainnya	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72,270,000	0	72,270,000	0	72,270,000	100.00	0
	000243. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72,270,000	0	72,270,000	0	72,270,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,180,000	0	26,180,000	0	26,180,000	100.00	0
	000246. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,180,000	0	26,180,000	0	26,180,000	100.00	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	360,000	0	0	0	0	0.00 %	360,000
	000244. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	360,000	0	0	0	0	0.00 %	360,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	800,000	0	0	0	0	0.00 %	800,000
	000245. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	800,000	0	0	0	0	0.00 %	800,000
RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		1,984,000	0	0	0	0	0.00 %	1,984,000
RAN.001 Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu		861,000	0	0	0	0	0.00 %	861,000
051 Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu		861,000	0	0	0	0	0.00 %	861,000
051.0A Rapat, identifikasi IT, koordinasi lintas sektor, ATK		861,000	0	0	0	0	0.00 %	861,000
521211	Belanja Bahan	861,000	0	0	0	0	0.00 %	861,000
	000247. Belanja ATK/Makan Minum/Penggandaan/Pencetakan	861,000	0	0	0	0	0.00 %	861,000
RAN.002 Pengelolaan Sarana IT Pemilu		1,123,000	0	0	0	0	0.00 %	1,123,000
052 Pengelolaan Sarana IT Pemilu		1,123,000	0	0	0	0	0.00 %	1,123,000
052.0A Layanan IT, jaringan, infrastruktur, pemeliharaan IT, dll		1,123,000	0	0	0	0	0.00 %	1,123,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	563,000	0	0	0	0	0.00 %	563,000
	000248. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	563,000	0	0	0	0	0.00 %	563,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	560,000	0	0	0	0	0.00 %	560,000
	000249. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	560,000	0	0	0	0	0.00 %	560,000
CQ.6867 Pembentukan Badan Adhoc		19,904,310,000	0	19,612,057,410	281,439,000	19,893,496,410	99.95 %	10,813,590

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 6 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	19,904,310,000	0	19,612,057,410	281,439,000	19,893,496,410	99.95 %	10,813,590
QGE.001 Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	271,860,000	0	231,861,100	35,956,750	267,817,850	98.51 %	4,042,150
051 Fasilitasi Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	271,860,000	0	231,861,100	35,956,750	267,817,850	98.51 %	4,042,150
051.0A Rapat - rapat, ATK, perlengkapan dukungan lainnya	271,860,000	0	231,861,100	35,956,750	267,817,850	98.51 %	4,042,150
521211 Belanja Bahan	69,760,000	0	68,946,500	0	68,946,500	98.83 %	813,500
000250. Belanja ATK/Makan Minum/Penggandaan/Pencetakan	69,760,000	0	68,946,500	0	68,946,500	98.83 %	813,500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20,000,000	0	19,200,000	0	19,200,000	96.00 %	800,000
000256. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20,000,000	0	19,200,000	0	19,200,000	96.00 %	800,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40,000,000	0	3,481,600	35,956,750	39,438,350	98.60 %	561,650
000349. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40,000,000	0	3,481,600	35,956,750	39,438,350	98.60 %	561,650
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,000,000	0	7,073,000	0	7,073,000	88.41 %	927,000
000255. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,000,000	0	7,073,000	0	7,073,000	88.41 %	927,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	86,360,000	0	86,360,000	0	86,360,000	100.00	0
000254. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	86,360,000	0	86,360,000	0	86,360,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	47,740,000	0	46,800,000	0	46,800,000	98.03 %	940,000
000253. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	47,740,000	0	46,800,000	0	46,800,000	98.03 %	940,000
QGE.002 Honorarium Badan Adhoc	12,695,050,000	0	12,695,050,000	0	12,695,050,000	100.00	0
051 Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	12,695,050,000	0	12,695,050,000	0	12,695,050,000	100.00	0
051.0A Honorarium Badan Adhoc	12,695,050,000	0	12,695,050,000	0	12,695,050,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	12,695,050,000	0	12,695,050,000	0	12,695,050,000	100.00	0
000080. Anggota	1,505,400,000	0	1,505,400,000	0	1,505,400,000	100.00	0
000082. Sekretaris	665,850,000	0	665,850,000	0	665,850,000	100.00	0
000083. Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis	1,215,900,000	0	1,215,900,000	0	1,215,900,000	100.00	0
000085. Ketua	928,800,000	0	928,800,000	0	928,800,000	100.00	0
000086. Anggota	5,108,400,000	0	5,108,400,000	0	5,108,400,000	100.00	0
000087. Pengamanan TPS/Satlinmas	1,083,600,000	0	1,083,600,000	0	1,083,600,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 7 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000088. Ketua	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000	100.00	0
000089. Anggota	633,600,000	0	633,600,000	0	633,600,000	100.00	0
000091. Sekretaris	133,200,000	0	133,200,000	0	133,200,000	100.00	0
000092. Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis	187,200,000	0	187,200,000	0	187,200,000	100.00	0
000093. Tenaga Adm PPK	184,600,000	0	184,600,000	0	184,600,000	100.00	0
000095. Ketua	868,500,000	0	868,500,000	0	868,500,000	100.00	0
QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc	6,937,400,000	0	6,685,146,310	245,482,250	6,930,628,560	99.90 %	6,771,440
051 Dukungan Operasional Badan Adhoc	6,937,400,000	0	6,685,146,310	245,482,250	6,930,628,560	99.90 %	6,771,440
051.0A Dukungan Operasional Badan Adhoc, Transport, Perjalanan Dinas, Sewa, dll	4,423,874,000	0	4,423,548,800	0	4,423,548,800	99.99 %	325,200
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,423,874,000	0	4,423,548,800	0	4,423,548,800	99.99 %	325,200
000072. PPK	360,000,000	0	360,000,000	0	360,000,000	100.00	0
000073. PPS	1,158,000,000	0	1,158,000,000	0	1,158,000,000	100.00	0
000074. TPS	774,000,000	0	774,000,000	0	774,000,000	100.00	0
000078. TPS	1,935,000,000	0	1,935,000,000	0	1,935,000,000	100.00	0
000340. Belanja Non Operasional Lainnya	196,874,000	0	196,548,800	0	196,548,800	99.83 %	325,200
051.0B Dukungan Bimtek PPK, PPS Dan KPPS	1,890,300,000	0	1,890,249,260	0	1,890,249,260	100.00	50,740
521211 Belanja Bahan	101,175,000	0	101,174,500	0	101,174,500	100.00	500
000288. Belanja ATK/Makan Minum/Spanduk	101,175,000	0	101,174,500	0	101,174,500	100.00	500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,494,470,000	0	1,494,419,760	0	1,494,419,760	100.00	50,240
000283. Belanja ATK dan Penggandaan Materi	46,050,000	0	45,999,760	0	45,999,760	99.89 %	50,240
000284. Belanja Makan Minum Bimtek PPK, PPS dan KPPS	564,900,000	0	564,900,000	0	564,900,000	100.00	0
000285. Belanja Spanduk	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
000286. Sewa Gedung, Meja, Kursi dan Sound	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000	100.00	0
000287. Bantuan Transportasi	758,520,000	0	758,520,000	0	758,520,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99,125,000	0	99,125,000	0	99,125,000	100.00	0
000289. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99,125,000	0	99,125,000	0	99,125,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 8 dari 17

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	82,670,000	0	82,670,000	0	82,670,000	100.00	0
	000290. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	82,670,000	0	82,670,000	0	82,670,000	100.00	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	112,860,000	0	112,860,000	0	112,860,000	100.00	0
	000291. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	112,860,000	0	112,860,000	0	112,860,000	100.00	0
051.0C	Dukungan Operasional Daerah Tersolir	383,226,000	0	371,348,250	8,281,850	379,630,100	99.06 %	3,595,900
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
	000341. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	383,225,000	0	371,348,250	8,281,850	379,630,100	99.06 %	3,594,900
	000350. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	383,225,000	0	371,348,250	8,281,850	379,630,100	99.06 %	3,594,900
051.0D	Evaluasi Pemilu Nasional	150,000,000	0	0	149,026,000	149,026,000	99.35 %	974,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150,000,000	0	0	149,026,000	149,026,000	99.35 %	974,000
	000391. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150,000,000	0	0	149,026,000	149,026,000	99.35 %	974,000
051.0E	Rapat Koordinasi Perencanaan	20,000,000	0	0	19,224,800	19,224,800	96.12 %	775,200
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,000,000	0	0	19,224,800	19,224,800	96.12 %	775,200
	000392. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,000,000	0	0	19,224,800	19,224,800	96.12 %	775,200
051.0F	Evaluasi SAKIP	20,000,000	0	0	19,250,100	19,250,100	96.25 %	749,900
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,000,000	0	0	19,250,100	19,250,100	96.25 %	749,900
	000393. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,000,000	0	0	19,250,100	19,250,100	96.25 %	749,900
051.0G	Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	30,000,000	0	0	29,716,900	29,716,900	99.06 %	283,100
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,000,000	0	0	29,716,900	29,716,900	99.06 %	283,100
	000394. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,000,000	0	0	29,716,900	29,716,900	99.06 %	283,100
051.0H	Dukungan Penguatan Kapasitas Pengelola Keuangan	20,000,000	0	0	19,982,600	19,982,600	99.91 %	17,400
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,000,000	0	0	19,982,600	19,982,600	99.91 %	17,400
	000395. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,000,000	0	0	19,982,600	19,982,600	99.91 %	17,400
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	99,666,000	0	96,712,427	0	96,712,427	97.04 %	2,953,573
	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	99,666,000	0	96,712,427	0	96,712,427	97.04 %	2,953,573

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 9 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QGE.001 Persiapan Kampanye Pemilu	67,000,000	0	66,009,427	0	66,009,427	98.52 %	990,573
051 Persiapan Kampanye Pemilu	67,000,000	0	66,009,427	0	66,009,427	98.52 %	990,573
051.0A Penyusunan rencana kerja, rapat - rapat, koordinasi dengan pihak terkait	67,000,000	0	66,009,427	0	66,009,427	98.52 %	990,573
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67,000,000	0	66,009,427	0	66,009,427	98.52 %	990,573
000260. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67,000,000	0	66,009,427	0	66,009,427	98.52 %	990,573
QGE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu	940,000	0	0	0	0	0.00 %	940,000
051 Pengelolaan Kampanye Pemilu	940,000	0	0	0	0	0.00 %	940,000
051.0A Kampanye, debat, rapat - rapat, materi kampanye, supervisi/monitoring, bimtek, dll	940,000	0	0	0	0	0.00 %	940,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	940,000	0	0	0	0	0.00 %	940,000
000262. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	940,000	0	0	0	0	0.00 %	940,000
QGE.003 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	31,726,000	0	30,703,000	0	30,703,000	96.78 %	1,023,000
051 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	31,726,000	0	30,703,000	0	30,703,000	96.78 %	1,023,000
051.0A Rapat, penggandaan bahan evaluasi, penyusunan buku/laporan	31,726,000	0	30,703,000	0	30,703,000	96.78 %	1,023,000
521211 Belanja Bahan	2,861,000	0	1,910,000	0	1,910,000	66.76 %	951,000
000263. Belanja ATK/Makan Minum	2,861,000	0	1,910,000	0	1,910,000	66.76 %	951,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28,865,000	0	28,793,000	0	28,793,000	99.75 %	72,000
000264. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28,865,000	0	28,793,000	0	28,793,000	99.75 %	72,000
CQ.6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1,617,030,000	0	1,475,342,175	77,228,000	1,552,570,175	96.01 %	64,459,825
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1,617,030,000	0	1,475,342,175	77,228,000	1,552,570,175	96.01 %	64,459,825
QGE.001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	29,184,000	0	28,966,560	0	28,966,560	99.25 %	217,440
051 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	29,184,000	0	28,966,560	0	28,966,560	99.25 %	217,440
051.0A Rapat, penyusunan bahan, koordinasi lintas sektor, ATK	29,184,000	0	28,966,560	0	28,966,560	99.25 %	217,440
521211 Belanja Bahan	10,891,000	0	10,673,560	0	10,673,560	98.00 %	217,440
000265. Belanja ATK/Makan Minum/Penggandaan/Pencetakan	10,891,000	0	10,673,560	0	10,673,560	98.00 %	217,440
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,293,000	0	18,293,000	0	18,293,000	100.00	0
000266. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,293,000	0	18,293,000	0	18,293,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 10 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QGE.002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,568,959,000	0	1,428,420,615	77,228,000	1,505,648,615	95.96 %	63,310,385
051 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,568,959,000	0	1,428,420,615	77,228,000	1,505,648,615	95.96 %	63,310,385
051.0A Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	125,827,000	0	118,143,000	6,181,000	124,324,000	98.81 %	1,503,000
521211 Belanja Bahan	39,444,000	0	38,610,000	0	38,610,000	97.89 %	834,000
000267. Belanja ATK/Makan Minum/Penggandaan/Pencetakan	39,444,000	0	38,610,000	0	38,610,000	97.89 %	834,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	100.00	0
000137. Pengarah	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	100.00	0
000138. Penanggung Jawab	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000	100.00	0
000139. Ketua	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
000140. Sekretaris	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	100.00	0
000141. Anggota	11,400,000	0	11,400,000	0	11,400,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64,023,000	0	57,533,000	6,181,000	63,714,000	99.52 %	309,000
000268. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64,023,000	0	57,533,000	6,181,000	63,714,000	99.52 %	309,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	360,000	0	0	0	0	0.00 %	360,000
000269. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	360,000	0	0	0	0	0.00 %	360,000
051.0B Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,309,173,000	0	1,250,425,115	36,047,000	1,286,472,115	98.27 %	22,700,885
521211 Belanja Bahan	263,882,000	0	263,487,880	0	263,487,880	99.85 %	394,120
000270. Belanja ATK/Makan Minum/Penggandaan/Pencetakan	179,014,000	0	178,619,880	0	178,619,880	99.78 %	394,120
000344. Penggandaan dan Pencetakan	84,868,000	0	84,868,000	0	84,868,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	67,403,000	0	49,182,980	11,047,000	60,229,980	89.36 %	7,173,020
000153. Logistik (Surat Suara, Formulir, Sampul, Alat Kelengkapan TPS, dll)	35,523,000	0	35,447,100	0	35,447,100	99.79 %	75,900
000292. Dukungan Internet, Listrik dan Air di gudang logistik	31,880,000	0	13,735,880	11,047,000	24,782,880	77.74 %	7,097,120
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	93,652,000	0	93,046,184	0	93,046,184	99.35 %	605,816
000295. Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya	93,652,000	0	93,046,184	0	93,046,184	99.35 %	605,816
522191 Belanja Jasa Lainnya	881,316,000	0	844,708,071	25,000,000	869,708,071	98.68 %	11,607,929

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 11 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000293. Tenaga Pendukung PPKom (Petugas Checker)	6,903,000	0	6,903,000	0	6,903,000	100.00	0
000294. Tenaga Pengamanan Gudang Logistik	142,872,000	0	117,872,000	25,000,000	142,872,000	100.00	0
000296. Bongkar Muat Logistik	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
000297. Sortir Lipat Surat Suara PPWP, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab	263,118,000	0	262,233,071	0	262,233,071	99.66 %	884,929
000298. Pengesetan Logistik	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	100.00	0
000299. Pengecekan Isi Kotak	18,390,000	0	18,000,000	0	18,000,000	97.88 %	390,000
000300. Pengepakkan	32,400,000	0	32,400,000	0	32,400,000	100.00	0
000301. Distribusi Logistik ke TPS	347,633,000	0	337,300,000	0	337,300,000	97.03 %	10,333,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,920,000	0	0	0	0	0.00 %	2,920,000
000271. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,920,000	0	0	0	0	0.00 %	2,920,000
051.0C Pengelolaan Dokumentasi Logistik	63,870,000	0	40,690,000	20,000,000	60,690,000	95.02 %	3,180,000
521211 Belanja Bahan	32,861,000	0	9,682,000	20,000,000	29,682,000	90.33 %	3,179,000
000272. Belanja Bahan ATK/Makan Minum	32,861,000	0	9,682,000	20,000,000	29,682,000	90.33 %	3,179,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,008,000	0	31,008,000	0	31,008,000	100.00	0
000273. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,008,000	0	31,008,000	0	31,008,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000347. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
051.0D Dukungan Operasional Logistik	70,089,000	0	19,162,500	15,000,000	34,162,500	48.74 %	35,926,500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	69,989,000	0	19,162,500	15,000,000	34,162,500	48.81 %	35,826,500
000229. Dukungan Operasional Logistik	69,989,000	0	19,162,500	15,000,000	34,162,500	48.81 %	35,826,500
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
000303. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
QGE.003 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	18,887,000	0	17,955,000	0	17,955,000	95.07 %	932,000
051 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	18,887,000	0	17,955,000	0	17,955,000	95.07 %	932,000
051.0A Rapat, penyusunan laporan, ATK, penggandaan, koordinasi	18,887,000	0	17,955,000	0	17,955,000	95.07 %	932,000
521211 Belanja Bahan	7,861,000	0	7,446,000	0	7,446,000	94.72 %	415,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 12 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000274. Belanja Bahan ATK/Makan Minum	7,861,000	0	7,446,000	0	7,446,000	94.72 %	415,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,026,000	0	10,509,000	0	10,509,000	95.31 %	517,000
000275. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,026,000	0	10,509,000	0	10,509,000	95.31 %	517,000
CQ.6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	1,639,380,000	0	1,636,931,000	0	1,636,931,000	99.85 %	2,449,000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1,639,380,000	0	1,636,931,000	0	1,636,931,000	99.85 %	2,449,000
QGE.001 Fasilitas Penyediaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	34,673,000	0	33,965,000	0	33,965,000	97.96 %	708,000
051 Fasilitas penyediaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	34,673,000	0	33,965,000	0	33,965,000	97.96 %	708,000
051.0A Rapat, penyusunan materi, koordinasi lintas sektor, ATK	34,673,000	0	33,965,000	0	33,965,000	97.96 %	708,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	100.00	0
000164. Pengarah	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
000165. Penanggung Jawab	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000	100.00	0
000166. Ketua	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000167. Sekretaris	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	100.00	0
000168. Anggota	5,700,000	0	5,700,000	0	5,700,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23,673,000	0	22,965,000	0	22,965,000	97.01 %	708,000
000276. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23,673,000	0	22,965,000	0	22,965,000	97.01 %	708,000
QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1,596,846,000	0	1,595,543,900	0	1,595,543,900	99.92 %	1,302,100
051 Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1,596,846,000	0	1,595,543,900	0	1,595,543,900	99.92 %	1,302,100
051.0A Pelaksanaan tungsura, rekap berjenjang, pengiriman logistik ke Kab/Kota (gudang), bimtek badan adhoc	1,596,846,000	0	1,595,543,900	0	1,595,543,900	99.92 %	1,302,100
521211 Belanja Bahan	845,357,000	0	845,357,000	0	845,357,000	100.00	0
000304. Belanja ATK/Makan Minum/ Tungsura dan Rekapitulasi Suara PPK	90,720,000	0	90,720,000	0	90,720,000	100.00	0
000305. Belanja ATK/Makan Minum/ Tungsura dan Rekapitulasi Suara PPS	34,740,000	0	34,740,000	0	34,740,000	100.00	0
000306. Belanja ATK/Makan Minum/ Tungsura dan Rekapitulasi Suara KPPS	650,160,000	0	650,160,000	0	650,160,000	100.00	0
000307. Belanja ATK/Makan Minum/ Tungsura dan Rekapitulasi Suara	69,737,000	0	69,737,000	0	69,737,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	177,996,000	0	177,603,000	0	177,603,000	99.78 %	393,000
000302. Belanja Sewa Gedung, Meja Kursi, Tenda dan	168,000,000	0	168,000,000	0	168,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 13 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Sound	168,000,000	0	168,000,000	0			0
000311. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9,996,000	0	9,603,000	0	9,603,000	96.07 %	393,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	235,343,000	0	234,663,900	0	234,663,900	99.71 %	679,100
000310. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	235,343,000	0	234,663,900	0	234,663,900	99.71 %	679,100
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	133,000,000	0	132,770,000	0	132,770,000	99.83 %	230,000
000309. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	133,000,000	0	132,770,000	0	132,770,000	99.83 %	230,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	205,150,000	0	205,150,000	0	205,150,000	100.00	0
000308. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	205,150,000	0	205,150,000	0	205,150,000	100.00	0
QGE.003 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7,861,000	0	7,422,100	0	7,422,100	94.42 %	438,900
051 Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	7,861,000	0	7,422,100	0	7,422,100	94.42 %	438,900
051.0A Rapat, penyusunan laporan, ATK, penggandaan, koordinasi	7,861,000	0	7,422,100	0	7,422,100	94.42 %	438,900
521211 Belanja Bahan	7,861,000	0	7,422,100	0	7,422,100	94.42 %	438,900
000277. Belanja Bahan ATK/Makan Minum	7,861,000	0	7,422,100	0	7,422,100	94.42 %	438,900
CQ.6981 Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	2,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	2,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000
QGE.001 Fasilitas Penyiapan Sumpah Janji	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
051 Fasilitas Penyiapan Sumpah Janji	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
051.0A PENYIAPAN SUMPAH JANJI	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521211 Belanja Bahan	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000312. Belanja ATK/Makan Minum/Spanduk	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
QGE.002 Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
051 Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
051.0A PELAKSANAAN SUMPAH JANJI	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000187. Sumpah Janji	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
CQ.6982 Penetapan Hasil Pemilu	6,000	0	0	0	0	0.00 %	6,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 14 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	6,000	0	0	0	0	0 0.00 %	6,000
QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	2,000	0	0	0	0	0 0.00 %	2,000
051 Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	2,000	0	0	0	0	0 0.00 %	2,000
051.0A Persiapan Logistik dan Penetapan Hasil Pemilu	2,000	0	0	0	0	0 0.00 %	2,000
521211 Belanja Bahan	1,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,000
000278. Belanja ATK/Makan Minum/Penggandaan/Pencetakan	1,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,000
000199. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,000
QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	4,000	0	0	0	0	0 0.00 %	4,000
051 Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	4,000	0	0	0	0	0 0.00 %	4,000
051.0A Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	4,000	0	0	0	0	0 0.00 %	4,000
521211 Belanja Bahan	1,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,000
000279. Belanja ATK/Makan Minum/Penggandaan/Pencetakan	1,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,000
000193. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,000
000194. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,000
000195. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,000
WA Program Dukungan Manajemen	2,526,929,000	0	2,288,701,963	169,571,288	2,458,273,251	97.28 %	68,655,749
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,436,661,000	0	2,200,319,463	169,571,288	2,369,890,751	97.26 %	66,770,249
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,436,661,000	0	2,200,319,463	169,571,288	2,369,890,751	97.26 %	66,770,249
EBA.994 Layanan Perkantoran	2,436,661,000	0	2,200,319,463	169,571,288	2,369,890,751	97.26 %	66,770,249
001 Gaji dan Tunjangan	2,436,661,000	0	2,200,319,463	169,571,288	2,369,890,751	97.26 %	66,770,249
001.0A Gaji dan Tunjangan	1,527,665,000	0	1,369,673,059	93,918,304	1,463,591,363	95.81 %	64,073,637
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	613,711,000	0	613,709,400	0	613,709,400	100.00	1,600

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 15 dari 17

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000200. Belanja Gaji Pokok PNS	613,711,000	0	613,709,400	0	613,709,400	100.00	1,600
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,000	0	9,067	0	9,067	90.67 %	933
	000201. Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,000	0	9,067	0	9,067	90.67 %	933
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	55,886,000	0	55,884,200	0	55,884,200	100.00	1,800
	000202. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	55,886,000	0	55,884,200	0	55,884,200	100.00	1,800
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	20,159,000	0	20,157,024	0	20,157,024	99.99 %	1,976
	000203. Belanja Tunj. Anak PNS	20,159,000	0	20,157,024	0	20,157,024	99.99 %	1,976
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0	47,880,000	0	47,880,000	100.00	0
	000204. Belanja Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0	47,880,000	0	47,880,000	100.00	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
	000205. Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	5,002,000	0	4,948,661	0	4,948,661	98.93 %	53,339
	000206. Belanja Tunj. PPh PNS	5,002,000	0	4,948,661	0	4,948,661	98.93 %	53,339
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	43,598,000	0	43,596,840	0	43,596,840	100.00	1,160
	000207. Belanja Tunj. Beras PNS	43,598,000	0	43,596,840	0	43,596,840	100.00	1,160
511129	Belanja Uang Makan PNS	83,434,000	0	23,057,000	5,932,000	28,989,000	34.74 %	54,445,000
	000208. Belanja Uang Makan PNS	83,434,000	0	23,057,000	5,932,000	28,989,000	34.74 %	54,445,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	20,302,000	0	17,850,000	0	17,850,000	87.92 %	2,452,000
	000209. Belanja Tunjangan Umum PNS	20,302,000	0	17,850,000	0	17,850,000	87.92 %	2,452,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	637,682,000	0	542,580,867	87,986,304	630,567,171	98.88 %	7,114,829
	000210. Belanja Pegawai (TUKIN)	637,682,000	0	542,580,867	87,986,304	630,567,171	98.88 %	7,114,829
001.0B	Uang Kehormatan	840,357,000	0	768,271,116	72,074,984	840,346,100	100.00	10,900
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	840,357,000	0	768,271,116	72,074,984	840,346,100	100.00	10,900
	000211. Uang Kehormatan Pejabat Negara	840,357,000	0	768,271,116	72,074,984	840,346,100	100.00	10,900
001.0C	Gaji dan Tunjangan PPPK	68,639,000	0	62,375,288	3,578,000	65,953,288	96.09 %	2,685,712
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	28,834,000	0	28,832,400	0	28,832,400	99.99 %	1,600
	000364. Belanja Gaji Pokok PPPK	28,834,000	0	28,832,400	0	28,832,400	99.99 %	1,600

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 16 dari 17

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,000	0	208	0	208	20.80 %	792
	000365. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,000	0	208	0	208	20.80 %	792
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
	000366. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
	000367. Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,860,000	0	4,860,000	0	4,860,000	100.00	0
	000368. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,860,000	0	4,860,000	0	4,860,000	100.00	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	653,000	0	651,780	0	651,780	99.81 %	1,220
	000369. Belanja Tunjangan Beras PPPK	653,000	0	651,780	0	651,780	99.81 %	1,220
511628	Belanja Uang Makan PPPK	3,256,000	0	1,147,000	259,000	1,406,000	43.18 %	1,850,000
	000371. Belanja Uang Makan PPPK	3,256,000	0	1,147,000	259,000	1,406,000	43.18 %	1,850,000
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	31,033,000	0	26,883,900	3,319,000	30,202,900	97.33 %	830,100
	000370. Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	31,033,000	0	26,883,900	3,319,000	30,202,900	97.33 %	830,100
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	90,268,000	0	88,382,500	0	88,382,500	97.91 %	1,885,500
	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	90,268,000	0	88,382,500	0	88,382,500	97.91 %	1,885,500
	EBA.994 Layanan Perkantoran	90,268,000	0	88,382,500	0	88,382,500	97.91 %	1,885,500
	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	90,268,000	0	88,382,500	0	88,382,500	97.91 %	1,885,500
002.0A	Operasional Kantor	90,268,000	0	88,382,500	0	88,382,500	97.91 %	1,885,500
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
	000319. Belanja Keperluan Perkantoran	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	54,327,000	0	54,327,000	0	54,327,000	100.00	0
	000212. Kuasa Pengguna Anggaran	14,175,000	0	14,175,000	0	14,175,000	100.00	0
	000213. Pejabat Pembuat Komitmen	13,944,000	0	13,944,000	0	13,944,000	100.00	0
	000214. Pejabat Penguji Taihan dan Penandatanganan SPM	6,384,000	0	6,384,000	0	6,384,000	100.00	0
	000215. Bendahara Pengeluaran	3,696,000	0	3,696,000	0	3,696,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 17 dari 17

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000216. Staf Pengelola	11,368,000	0	11,368,000	0	11,368,000	100.00	0
000217. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4,760,000	0	4,760,000	0	4,760,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	1,858,000	0	0	0	0	0.00 %	1,858,000
000282. Pakian Dinas, Pakian Sopir/Kebersihan/Pramubakti, Pakian Satpam	1,858,000	0	0	0	0	0.00 %	1,858,000
522111 Belanja Langganan Listrik	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000221. Biaya Listrik	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
522141 Belanja Sewa	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000320. Belanja Sewa	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6,800,000	0	6,775,500	0	6,775,500	99.64 %	24,500
000281. Belanja Pemeliharaan Gedung ,Bangunan Dan Halaman Kantor	6,800,000	0	6,775,500	0	6,775,500	99.64 %	24,500
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23,160,000	0	23,160,000	0	23,160,000	100.00	0
000280. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23,160,000	0	23,160,000	0	23,160,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,120,000	0	4,120,000	0	4,120,000	100.00	0
000227. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,120,000	0	4,120,000	0	4,120,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat

Telp. (021) 31937223

Email: persuratan@kpu.go.id

Jakarta, 8 Januari 2025

Nomor : 95/PR.03-SD/01/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2024

Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

di -
Tempat

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas KPU berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan pelaksanaan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Format Pelaporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang dilaporkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Sistematika Laporan Kinerja

KATA PENGANTAR

Membuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Rencana Kinerja Tahunan
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu

c. Pola Analisis Capaian Kinerja

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

d.

Se
Ta
dis
da
ht
Fe
No